

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi salah satu indikator utama kemajuan perekonomian suatu negara. Efisiensi kerja dari tenaga kerja produktif memegang peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses produksi barang dan jasa, sehingga peran tenaga kerja sangat dibutuhkan bagi perkembangan suatu wilayah atau negara (Krugman & Wells, 2008).

Penciptaan lapangan kerja merupakan tujuan utama pertumbuhan ekonomi. Kecukupan lapangan kerja tersebut digunakan agar dapat *catch up* dengan pertumbuhan angkatan kerja. Di beberapa negara berkembang, seperti di Indonesia, pertumbuhan jumlah pekerja lebih tinggi daripada jumlah ketersediaan lapangan kerja. Keadaan ini disebabkan oleh struktur industri negara berkembang dengan kecenderungan memiliki diversifikasi kegiatan ekonomi rendah, dan masyarakat cenderung kurang memiliki keterampilan, sehingga upaya penciptaan lapangan kerja menjadi lebih kompleks. Dalam penyelenggaraan dan pengendalian sistem perekonomian, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi, tenaga kerja merupakan unsur produksi paling penting.

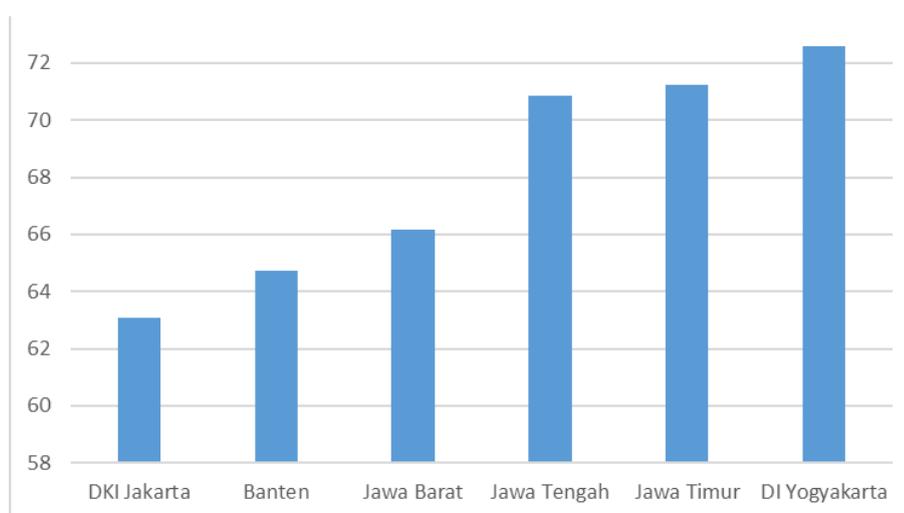
Peningkatan angkatan kerja di Indonesia disebabkan oleh banyak individu bekerja dengan tujuan tertentu, sedangkan tujuan utama dari bekerja adalah untuk dapat memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Terlihat jelas bahwa dalam kondisi

saat ini, masyarakat tertentu masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena partisipasi angkatan kerja menurun akibat pertumbuhan angkatan kerja terus meningkat, namun tidak dibarengi dengan peningkatan ketersediaan lapangan kerja.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga ditentukan oleh angkatan kerja di wilayah tersebut. Definisi Menurut Badan Pusat Statistik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meliputi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) bukan merupakan angkatan kerja, termasuk penduduk masih bersekolah dan menjalankan pekerjaan lain selain pekerjaan proibadi. Angkatan kerja mencakup penduduk berusia di atas 15 tahun mempunyai pekerjaan, meskipun pekerjaan itu bersifat sementara. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari individu-individu usia kerja masih bersekolah, mengurus keluarga, atau melakukan aktivitas di luar kehidupan pribadinya. Salah satu ukuran utama dan perlu dipertimbangkan ketika menilai keberhasilan perekonomian adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kadang-kadang, tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan sebagai ukuran kegiatan ekonomi masyarakat. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa banyak masyarakat berkontribusi dalam kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, Tenaga kerja memiliki hubungan sangat erat dengan jumlah penduduk. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia (World Bank, 2023). Menurut teori hipotetis klasik Adam Smith, penduduk merupakan faktor produksi terpenting penentu kekayaan suatu negara. Syarat cukup bagi pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan sumber daya manusia efektif. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi maka keberadaan tenaga kerja menjadi hal cukup penting.

Pertumbuhan angkatan kerja mirip dengan pertumbuhan penduduk, namun pertumbuhan ini menciptakan lapangan kerja baru dengan lebih lambat. Ketika angkatan kerja meningkat, pasar tenaga kerja tidak dapat menyerap seluruh pekerja, sehingga mengganggu keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, sehingga menyebabkan pengangguran. Dengan jumlah penduduk sebanyak 151.650,2 ribu jiwa, Pulau Jawa menempati posisi teratas sebagai negara terpadat di Indonesia pada tahun 2020. Karena jumlah tersebut, penduduk Pulau Jawa kini berpeluang memasuki pasar tenaga kerja. Pertumbuhan populasi dengan cepat dapat memberikan tantangan signifikan terhadap penyediaan lapangan kerja dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Pulau Jawa menjadi perhatian khusus mengingat kontribusi signifikan pulau ini terhadap perkembangan ekonomi nasional. Selain itu, perkembangan infrastruktur dan konektivitas di Pulau Jawa dapat mempengaruhi distribusi peluang kerja dan mobilitas angkatan kerja.

Gambar 1. 1 TPAK di Pulau Jawa Tahun 2022 (%)



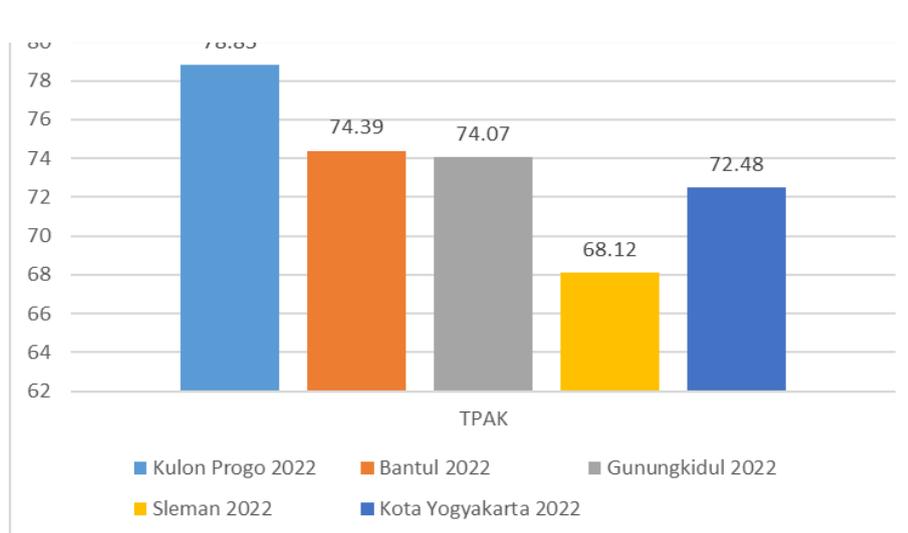
Sumber: Publikasi BPS Nasional, 2022

Di Pulau Jawa presentase TPAK tertinggi diraih oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai 72,60%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah sebuah metrik pengukur proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK dengan nilai tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak tenaga kerja bersedia untuk berpartisipasi dalam produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Namun, penting untuk dicatat bahwa peningkatan TPAK harus disertai dengan pembukaan lapangan kerja guna mencegah kenaikan angka pengangguran. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki karakteristik unik dengan mencerminkan warisan budaya dan sejarah daerah. Dalam konteks ini, tingkat partisipasi angkatan kerja di DIY menjadi perhatian utama, mengingat peran strategis provinsi ini dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan global, perubahan dalam sektor ekonomi DIY, seperti pertanian, industri kreatif, dan pariwisata, dapat memberikan dampak signifikan pada ketersediaan peluang pekerjaan. Sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi karena tingkat partisipasi angkatan kerja semakin bertambah. (Mirah et al., 2020).

TPAK provinsi DI Yogyakarta memiliki angka 72,60% secara rata-rata. Data tersebut mencerminkan bahwa semakin besar ketersediaan tenaga kerja untuk memproduksi dan menyediakan barang dan jasa maka semakin membantu dalam merangsang aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Pengendalian dan pemanfaatan pasokan tenaga kerja di DIY secara optimal dapat meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah. Harapan setiap pemerintah daerah adalah jika masyarakat dapat meningkatkan produktivitas untuk daerah, maka semakin banyak tenaga kerja produktif dan semakin banyak pula

lapangan kerja dapat tercipta, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan pemerintah daerah (Wahyudi & Yuliarmi, 2018). Apabila masalah pengangguran dapat diatasi dengan peningkatan angkatan kerja dengan diserap atau ditampung lapangan kerja, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu, peningkatan jumlah pengangguran tidak mendapatkan pekerjaan dapat berdampak pada perubahan berbagai aspek sosial masyarakat, termasuk kenaikan kriminalitas dan kemiskinan. Penciptaan sumber daya manusia berkualitas merupakan fungsi utama pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu komponen pembangunan daerah dan nasional. Hal ini terutama berlaku untuk aspek pengembangan sumber daya manusia. Salah satu faktor berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah perluasan sektor lapangan kerja, karena tenaga kerja merupakan salah satu komponen produksi cukup penting dalam mendorong kegiatan perekonomian.

Gambar 1. 2 Jumlah TPAK di DIY Tahun 2022 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY

Berdasarkan grafik 1.2 Pola pertumbuhan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan bahwa TPAK di wilayah pedesaan secara konsisten

lebih tinggi daripada di wilayah perkotaan. Tingkat TPAK di pedesaan berada dalam kisaran 71-81%, sementara di perkotaan berkisar antara 66-72%. Fenomena ini disebabkan oleh kecenderungan penduduk pada daerah perkotaan, terutama pada usia muda, untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Secara spesifik, TPAK tertinggi tercatat di Kabupaten Klong Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Sedangkan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki TPAK terendah. Penurunan TPAK di Sleman dan Yogyakarta disebabkan oleh peningkatan proporsi penduduk usia kerja masih bersekolah atau sedang menjalankan pendidikan. Pola TPAK Kabupaten Kulon Progo sama dengan D.I. Yogyakarta dan TPAK Nasional. Namun lebih tinggi di tingkat Yogyakarta dan nasional tetapi memiliki pola fluktuasi hampir sama. Karena masih ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian, maka statistik TPAK Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan. Meskipun pendapatan relatif rendah, banyak penduduk Kabupaten Kulon Progo aktif terlibat dalam produksi barang dan jasa ekonomi.

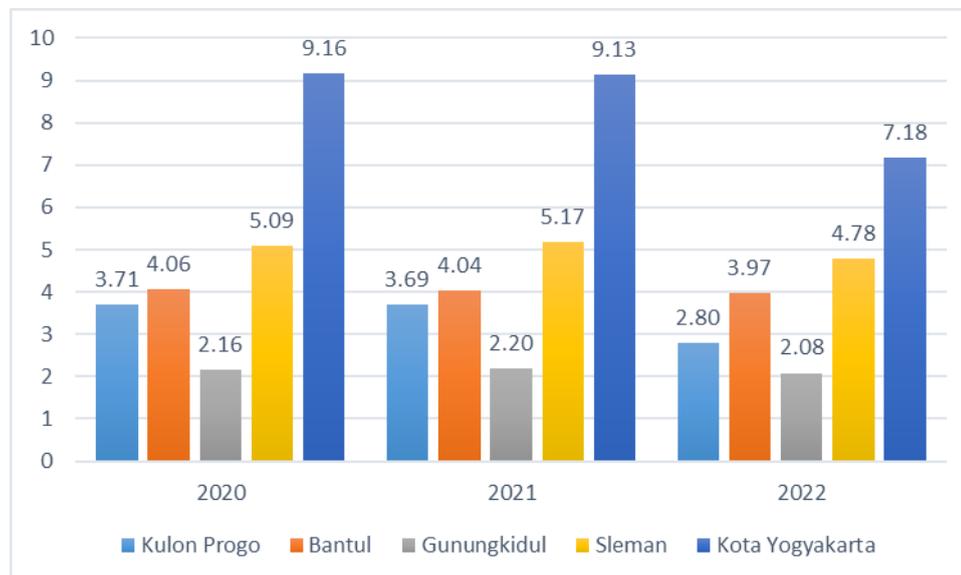
Permasalahan ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta bermula dari fakta bahwa lapangan kerja berkembang lebih lambat dibandingkan dengan angkatan kerja, sehingga tidak mampu menurunkan angka pengangguran dengan cepat. Maka, peningkatan angka pengangguran menjadi penyebab pengaruh fluktuasi nilai TPAK. Perekonomian menderita akibat pengangguran karena meskipun berpotensi berdampak positif terhadap partisipasi angkatan kerja, namun juga mempunyai dampak negatif. Pengangguran dianggap sebagai beban karena mereka adalah individu tanpa pendapatan sehingga dapat menyebabkan kemiskinan, serta menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial lain. Peningkatan angka

pengangguran disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja melampaui pertumbuhan kesempatan kerja (Kairupan, 2013).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dan total angkatan kerja serta dinyatakan dalam bentuk persen. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional, TPT mencakup empat kategori, yakni individu tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, individu tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, individu tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa sulit mendapatkan pekerjaan, dan individu tidak bekerja serta tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tetapi belum memulai bekerja. Tolak ukur keberhasilan pemerintah di bidang perekonomian adalah dengan penurunan angka TPT. Semakin rendah angka pengangguran maka semakin banyak aktivitas perekonomian dan semakin berhasil pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Peningkatan angka pengangguran secara tidak langsung menurunkan pendapatan per kapita sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Struktur ekonomi DIY dengan kecenderungan menjadi pusat pendidikan dan pariwisata, dapat memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Mayoritas pengangguran di DIY adalah generasi muda, berpendidikan menengah, tidak mempunyai keterampilan khusus, dan kurang pengalaman kerja. Karena ketersediaan jumlah lapangan kerja semakin rendah terutama di sektor formal dan kurang relevansi latar belakang pendidikan dengan pekerjaan sehingga menyebabkan tingkat pengangguran tahunan di kalangan generasi muda tetap tinggi. Mengurangi tingkat pengangguran adalah salah satu prioritas utama pembangunan.

Gambar 1. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DIY Tahun 2020-2022 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta

Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2020-2022 menunjukkan perbedaan rata-rata antara lima kabupaten, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta mencatatkan rata-rata TPT tertinggi sebesar 9,16 persen, sedangkan Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata terendah sebesar 2,08 persen. Perbedaan ini terjadi karena wilayah perkotaan memiliki lebih banyak sektor formal dibandingkan pedesaan. Karena sektor formal menuntut keterampilan atau kriteria tertentu, maka pekerja lebih sulit untuk masuk. Sedangkan penduduk pedesaan cenderung kurang selektif dalam memilih pekerjaan, sehingga mereka bersedia melakukan berbagai jenis pekerjaan, termasuk pekerja keluarga, pekerja bebas di bidang pertanian, atau bekerja di perkotaan sambil tetap tinggal di pedesaan.

Pengangguran terbuka dan partisipasi angkatan kerja adalah dua aspek signifikan dalam konteks ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran terbuka

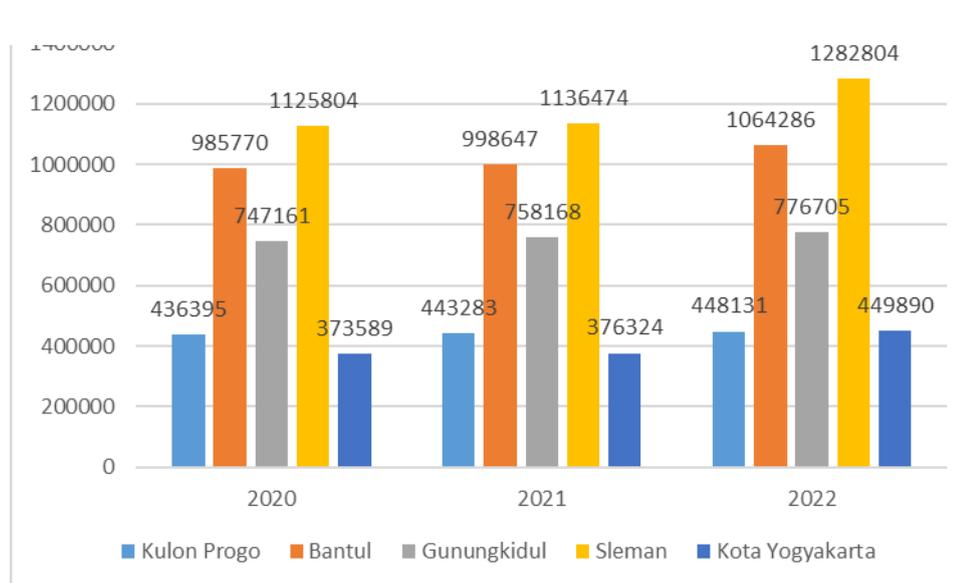
mencerminkan seberapa banyak individu pencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan sejauh mana angkatan kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hubungan antara kedua faktor ini memiliki dampak langsung pada dinamika ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka menjadi indikator penting dan dapat mencerminkan efektivitas pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja. Peningkatan tingkat pengangguran dapat menandakan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran pekerjaan, sehingga merugikan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan sejauh mana angkatan kerja berkontribusi pada kegiatan ekonomi. Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat menandakan bahwa terdapat kelompok masyarakat tidak terlibat secara optimal dalam pembangunan ekonomi, dan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Selain tingkat pengangguran, penduduk juga memiliki dampak signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Selain tingkat pengangguran, jumlah penduduk juga menjadi faktor yang mempunyai dampak signifikan terhadap TPAK. Menurut teori David Ricardo, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dengan memiliki peran dalam menentukan output nasional. Sehingga negara atau daerah, terutama negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk padat, mempunyai peluang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Ardella et al., 2019). Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan masalah kependudukan terutama dalam masalah ketenagakerjaan. Penciptaan lapangan kerja adalah salah satu tujuan utama pertumbuhan ekonomi, dan dapat dicapai setelah perluasan angkatan kerja.

Populasi penduduk usia produktif akan terkena dampak dari laju peningkatan pertumbuhan penduduk terkhusus di negara-negara berkembang. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi penduduk dan penciptaan lapangan kerja menyebabkan peningkatan pengangguran, sehingga jumlah penduduk sedang bekerja lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengangguran. Situasi ini terjadi akibat kurangnya lapangan kerja, dan jika berkelanjutan dapat menjadi beban bagi pembangunan nasional.

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari lima wilayah, meliputi empat kabupaten dan satu kota, antara lain Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk Provinsi DIY terus meningkat setiap tahun, meskipun nilai peningkatan tidak besar. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi DIY terus mengalami pertumbuhan pada setiap tahun meskipun pertumbuhan tidak begitu besar tetapi dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Jumlah penduduk DIY tahun 2022 mencapai angka 4.021.816 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk dapat meningkatkan tenaga kerja sehingga mempengaruhi jumlah angkatan kerja di DIY. Dengan begitu D.I. Yogyakarta memiliki peluang untuk dapat memaksimalkan ketersediaan tenaga kerja, terlebih DIY merupakan salah satu daerah di Pulau Jawa yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat baik namun berfluktuatif. Jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Yogyakarta mempunyai angka paling rendah.

Gambar 1. 4 Jumlah Penduduk DIY Tahun 2020-2022 (Juta Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta

Berdasarkan grafik 1.4 Jumlah penduduk tertinggi di Provinsi DIY pada periode 2020-2022 tercatat berada di Kabupaten Sleman, sedangkan terendah berada di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Sleman mencapai 1.282.804 jiwa, atau sekitar 29,72 persen dari total penduduk DIY. Kepadatan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh luas wilayah relatif besar serta pembangunan masif dengan menyediakan berbagai fasilitas dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perluasan fasilitas tersebut, warga akan betah tinggal di Kabupaten Sleman karena kemudahan akses terhadap pendidikan, kesehatan, hiburan dan masih banyak lagi.

Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun akan mempengaruhi jumlah angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk usia kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat, terlihat dari data tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, angkatan kerja di wilayah tersebut sebanyak 3,2 juta jiwa, memiliki arti bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 72,6

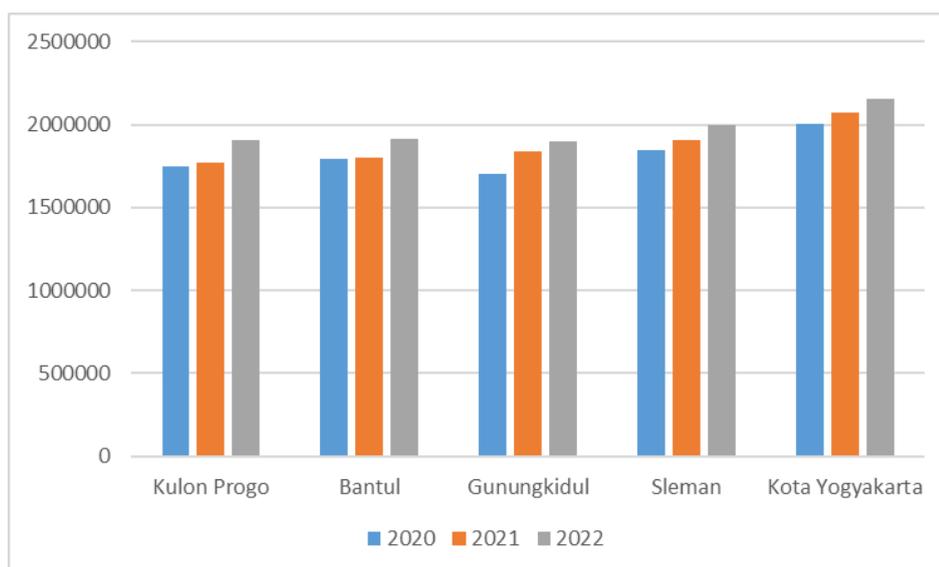
persen. Grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja dapat melakukan kegiatan ekonomi secara aktif, terlepas dari apakah mereka bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau menganggur. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja dapat menyebabkan peningkatan jumlah sumber daya manusia sedang terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian. Apabila angkatan kerja tersebut berhasil terserap dengan baik dalam lapangan kerja, dampak positif dapat dirasakan melalui kontribusi signifikan terhadap pembangunan di wilayah tersebut. (Astina, 2021).

Salah satu strategi agar dapat digunakan untuk meningkatkan TPAK adalah dengan peningkatan pendapatan pekerja melalui kesesuaian pemberian upah. Upah dapat memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dari sudut pandang penawaran tenaga kerja, tingkat upah di lingkungan kerja menjadi salah satu variabel kunci dengan pengaruh signifikan. Penawaran kenaikan upah kepada pekerja berpotensi meningkatkan minat serta partisipasi penduduk dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, tingkat upah rendah dapat menurunkan tingkat keterampilan pekerja, sedangkan tingkat upah tinggi dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. (Hardiani et al., 2020).

Upah adalah hak pekerja dinyatakan dan diterima oleh pemberi kerja atau pemilik usaha dalam bentuk uang sebagai balas jasa. Pemerintah menetapkan peraturan pengupahan untuk menjamin setiap orang mempunyai akses terhadap jumlah uang dengan nominal cukup. Pemerintah Daerah menetapkan Upah Minimum Kota dan Kabupaten setiap tahun. Banyak orang akan tertarik memasuki pasar kerja karena upah tinggi di suatu daerah. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan kependekan dari standar upah minimum dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penetapan UMK dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisi

ekonomi dan biaya hidup di suatu wilayah, dengan tujuan utama untuk melindungi pekerja dari upah tidak sesuai. Aturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja lokal dan menetapkan persyaratan gaji dengan nilai sepadan dengan kondisi kehidupan setempat. Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat memberikan dampak positif pada tingkat partisipasi angkatan kerja. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar provinsi di Pulau Jawa memiliki upah minimum lebih rendah dibandingkan dengan UMP Nasional, tetapi UMP di Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahun.

**Gambar 1. 5 Perkembangan UMK Provinsi DIY Tahun 2020-2022
(Dalam Ribuan)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta

Berdasarkan grafik 1.5 Upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan peningkatan pada setiap tahun. Pada tahun 2022, Kota Yogyakarta mencatat nilai upah minimum tertinggi, yakni sebesar Rp 2.153.970 per bulan, sedangkan Kabupaten Gunungkidul mencatat nilai terendah dengan Rp 1.900.000 per bulan. Memiliki arti peran upah minimum cukup berpengaruh dalam

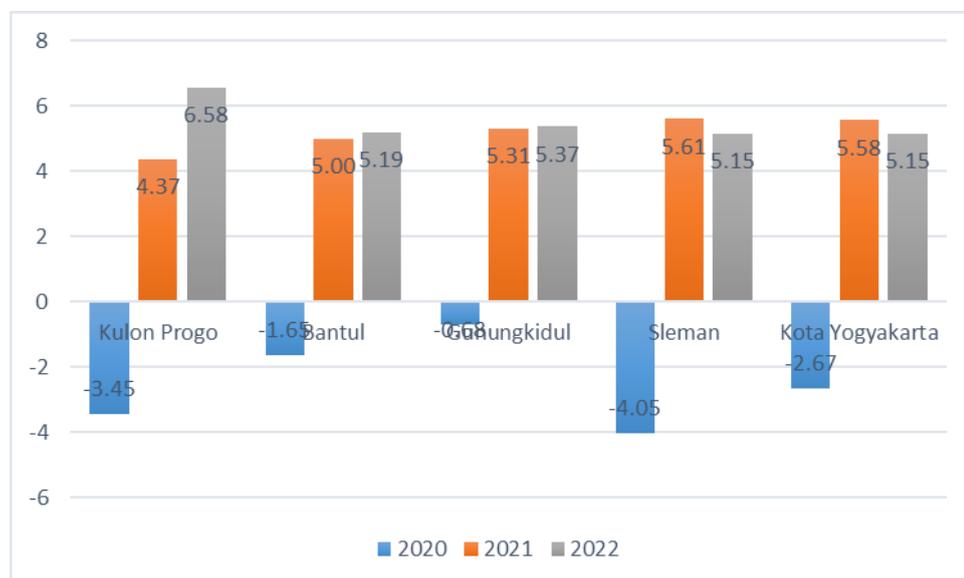
meningkatkan partisipasi angkatan kerja karena upah tinggi di pasar tenaga kerja akan banyak penduduk dapat tertarik masuk ke dalam pasar kerja. Dengan semakin meningkat penduduk masuk ke pasar kerja masyarakat dapat membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dengan tercukupi. Peningkatan jumlah tenaga kerja berdampak pada kenaikan upah, dan perubahan dalam tingkat upah tersebut dapat memberikan dorongan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mubarak & Nugroho, 2020).

Selain Upah Minimum Kabupaten/Kota, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi TPAK, karena peningkatan output produksi merupakan ciri pertumbuhan ekonomi. Peningkatan nilai Produk Regional Bruto dapat memacu pertumbuhan penjualan dalam semua kegiatan ekonomi. Semakin besar output atau penjualan perusahaan, semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan jumlah pekerja (Saputra et al., 2019). Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi, memainkan peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tingkat pengangguran lebih rendah secara umum menyertai pertumbuhan ekonomi, sehingga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lebih rendah dan peningkatan penciptaan lapangan kerja berhubungan dengan nilai pertumbuhan ekonomi lebih besar (Mimbar & Yusuf, 2016).

Pertumbuhan ekonomi memegang peranan krusial dalam konteks perekonomian suatu negara, mengemban fungsi sebagai indikator utama untuk mengukur kemajuan ekonomi bangsa. Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dengan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat sebagai tolak ukur kemajuan perekonomian suatu daerah, terpenting dalam hal upaya meningkatkan output produk dan jasa. Melalui peningkatan tersebut, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru dan

muncul berbagai peluang-peluang ekonomi, sehingga akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Mirah et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan dan dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, jadi itulah alasan utama pertumbuhan ekonomi masih menjadi isu ekonomi jangka panjang bagi suatu negara. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk memberikan masyarakat di daerah lebih banyak pilihan pekerjaan, baik dari segi kuantitas dan keragaman. Pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan tingkat produktivitas dan pendapatan melalui penciptaan peluang kerja, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan secara keseluruhan (Imanto et al., 2020).

Gambar 1. 6 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020-2022 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta

Secara umum pertumbuhan ekonomi Provinsi Yogyakarta masih berada pada level terendah dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan provinsi besar lain di

Pulau Jawa. Berdasarkan Grafik 1.6 laju pertumbuhan ekonomi Di Yogyakarta terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Kabupaten Bantul mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi paling rendah sebesar 5,19 persen, sementara Kabupaten Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta menonjol dengan performa lebih baik di provinsi ini. Tingkat kontribusi PDRB diungguli oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, dan semakin banyak suatu perusahaan memproduksi atau menjual barang dan jasa maka semakin banyak pula orang dapat dipekerjakan (Saputra dkk., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun variabel produksi tenaga kerja merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perluasan kesempatan kerja. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan TPAK.

Beberapa penelitian sejalan dengan penelitian tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sebagai contoh, (Nuraisyah, 2019) Mengkaji dampak menguntungkan dari upah minimum provinsi di Sumatera Barat dan ekspansi ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di daerah tersebut. Selain itu, penelitian yang dilakukan antara tahun 2008-2017 di sejumlah provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi berdampak negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, sedangkan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk sesuai umur, dan pendidikan memiliki pengaruh positif.

Berdasarkan latar belakang tersebut telah dijelaskan peningkatan TPAK dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, upah, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi TPAK di Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kota dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi D.I. Yogyakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang, rumusan masalah dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Jumlah Penduduk dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Upah Minimum Kota dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah, disimpulkan tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kota terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang, disimpulkan ruang lingkup dari penelitian yaitu:

1. Ruang lingkup penelitian ini meliputi Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta
2. Kegiatan pengambilan data jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Badan Pusat Statistik (BPS)

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap manfaat penelitian yang dilakukan untuk pihak yang dituju antara lain :

1. Kepada pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya untuk menambah pengetahuan baru terkait masalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
2. Kepada pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi kementerian ketenagakerjaan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

3. Kepada penulis, penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait masalah yang diteliti yaitu faktor-faktor pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Kepada akademisi, penelitian ini dapat menambah pembendaharaan perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.